

Materi Pembelajaran Kebijakan Pariwisata Minggu ke-2

1. Definisi dan Konsep Kebijakan Pariwisata
2. Ciri Khas Kebijakan Pariwisata

Definisi dan Konsep Kebijakan Pariwisata

Goeldner dan Ritchie (2006) mendefinisikan kebijakan pariwisata sebagai regulasi, aturan, pedoman, arah, dan sasaran pembangunan/promosi serta strategi yang memberikan kerangka dalam pengambilan keputusan individu maupun kolektif yang secara langsung mempengaruhi pengembangan pariwisata dalam jangka panjang dan sekaligus kegiatan sehari-hari yang berlangsung di suatu destinasi.

Biederman (2007) menambahkan hal penting dalam definisi kebijakan kepariwisataan dengan mengemukakan bahwa prinsip dari kebijakan kepariwisataan adalah harus menjamin negara maupun daerah mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari kontribusi sosial dan ekonomi yang diberikan pariwisata. Biederman juga menyebutkan bahwa sasaran akhir dari kebijakan pariwisata adalah peningkatan kemajuan negara atau daerah dan kehidupan warga negaranya.

'A tourism policy defines the direction or course of action that a particular country, region, locality or an individual destination plans to take when developing or promoting tourism. The key principle for any tourism policy is that it should ensure that the nation (region or locality) would benefit to the maximum extent possible from the economic and social contributions of tourism. The ultimate objective of a tourism policy is to improve the progress of the nation (region or locality) and the lives of its citizens'.

Definisi yang lebih luas dikemukakan oleh Edgell, dkk (2008) yang mengemukakan bahwa kebijakan pariwisata merupakan kerangka etis yang terfokus pada isu-isu yang dihadapi dan mempertemukan secara efektif keinginan/kebutuhan masyarakat dengan rencana, pembangunan, produk, pelayanan, pemasaran, serta tujuan dan sasaran keberlanjutan bagi pertumbuhan pariwisata di masa yang akan datang, seperti yang dinyatakan berikut ini.

'Tourism policy is a progressive course of actions, guidelines, directives, principles, and procedures set in an ethical framework that is issues-focused and best represents the intent of a community (or nation) to effectively meet its planning, development, product, service, marketing, and sustainability goals and objectives for the future growth of tourism'.

Definisi terakhir menjadikan pemasaran, pengembangan produk, dan pelayanan *hospitality* memegang peranan penting dalam kebijakan kepariwisataan.

Lebih penting lagi, definisi tersebut mengisyaratkan bahwa kebijakan kepariwisataan bersifat dinamis dan fleksibel dalam melakukan penyesuaian dan penyempurnaan terhadap perkembangan yang terjadi.

Kebijakan kepariwisataan terkait erat dengan perencanaan kepariwisataan. Menurut Edgell, dkk. (2008) perencanaan kepariwisataan memperkuat kedudukan kebijakan kepariwisataan dalam pembangunan. Edgell, dkk (2008) mengemukakan bahwa model perencanaan pariwisata mencakup pernyataan visi dan misi yang diikuti oleh serangkaian tujuan, sasaran, strategi, dan taktik dalam pengembangan pariwisata.

Kebijakan dan perencanaan kepariwisataan seharusnya dapat berfungsi secara efektif sebagai arah pembangunan kepariwisataan suatu destinasi. Akan tetapi, pada kenyataannya banyak sekali konflik kepentingan di tingkat para pengambil keputusan pada saat mengimplementasikan kebijakan maupun perencanaan kepariwisataan yang sebenarnya sudah disepakati bersama sehingga perkembangan pariwisata tidak lagi mengacu pada kebijakan dan perencanaan yang sudah dibuat.

Kebijakan pariwisata adalah serangkaian tindakan, strategi, dan regulasi yang dirancang oleh pemerintah atau otoritas terkait untuk mengelola, mempromosikan, dan mengembangkan sektor pariwisata dalam suatu wilayah. Tujuan kebijakan ini adalah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, melestarikan budaya dan lingkungan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Konsep kebijakan pariwisata mencakup beberapa elemen penting seperti:

Konsep Kebijakan Pariwisata dan Contohnya	
Pembangunan pariwisata berkelanjutan	Pengembangan ekowisata di Taman Nasional Komodo yang menjaga populasi komodo sekaligus mengatur jumlah wisatawan yang berkunjung.
Pengembangan destinasi wisata	Pembangunan kawasan pariwisata Mandalika di Lombok sebagai salah satu Destinasi Super Prioritas yang dirancang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional.
Diversifikasi produk pariwisata	Pengembangan Bali sebagai destinasi wisata kesehatan dan kebugaran, serta pengenalan festival budaya seperti Dieng Culture Festival di Jawa Tengah.
Pemberdayaan masyarakat lokal	Program pelatihan bagi masyarakat di Yogyakarta untuk mengembangkan homestay dan bisnis kuliner yang mendukung pariwisata budaya.
Promosi dan pemasaran pariwisata	Partisipasi Indonesia dalam pameran pariwisata internasional seperti ITB Berlin untuk memperkenalkan potensi wisata Indonesia kepada pasar global.
Regulasi dan kebijakan pendukung	Penerapan aturan ketat terhadap pembangunan di kawasan konservasi seperti Raja Ampat, serta pelarangan aktivitas yang merusak ekosistem laut.

Peningkatan infrastruktur pariwisata	Pembangunan bandara internasional di Labuan Bajo untuk mendukung kunjungan wisatawan ke Taman Nasional Komodo.
Pariwisata inklusif	Peningkatan aksesibilitas di kawasan wisata utama seperti Bali dan Yogyakarta dengan menyediakan fasilitas ramah disabilitas di tempat-tempat wisata dan akomodasi.

Tabel 1. Konsep Kebijakan Pariwisata dan Contohnya

Ciri Khas Kebijakan Pariwisata

1. Visi dan Misi Strategis

Kebijakan pariwisata umumnya dibentuk berdasarkan visi jangka panjang pemerintah atau organisasi terkait untuk mengembangkan industri pariwisata. Visi ini mencakup peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal, pelestarian lingkungan, serta promosi destinasi wisata. Misi strategis ini kemudian diimplementasikan melalui beberapa kebijakan utama:

- a. Peningkatan daya tarik wisata dengan memperbaiki infrastruktur destinasi, mengembangkan atraksi baru, dan mempromosikan budaya lokal.
- b. Promosi dan pemasaran internasional untuk menarik wisatawan asing melalui kampanye pemasaran yang disesuaikan dengan pasar target, misalnya dengan menggunakan media digital.
- c. Pelatihan tenaga kerja untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia di sektor pariwisata.

2. Pendekatan Berkelanjutan

Kebijakan pariwisata modern semakin berfokus pada *sustainability* atau keberlanjutan. Ini mencakup pelestarian lingkungan, budaya, dan sosial, serta mempertimbangkan dampak ekonomi jangka panjang. Kebijakan ini melibatkan:

- a. Pengelolaan sumber daya alam agar tidak dieksploitasi secara berlebihan, seperti pengaturan jumlah pengunjung di kawasan konservasi.
- b. Pengelolaan sampah dan polusi di destinasi wisata, khususnya di daerah sensitif lingkungan seperti pantai atau taman nasional.
- c. Partisipasi masyarakat lokal, di mana kebijakan ini mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata, sehingga memberikan manfaat ekonomi langsung kepada mereka.

3. Pemberdayaan dan Keterlibatan Komunitas Lokal

Salah satu aspek penting dari kebijakan pariwisata yang berhasil adalah pemberdayaan masyarakat lokal. Melalui:

- a. Pemberian pelatihan keterampilan kepada penduduk setempat dalam bidang perhotelan, kuliner, kerajinan tangan, dan manajemen wisata.
- b. Pengembangan pariwisata berbasis komunitas (*Community-Based Tourism*), di mana masyarakat memiliki dan mengelola atraksi wisata di daerah mereka.
- c. Dukungan terhadap usaha kecil dan menengah (UMKM) lokal seperti penyediaan bantuan modal, fasilitasi pemasaran produk lokal, dan promosi usaha ekonomi kreatif.

4. Peran Infrastruktur dan Teknologi

Inisiatif infrastruktur memegang peranan kunci dalam implementasi kebijakan pariwisata yang sukses. Beberapa elemen yang umumnya difokuskan adalah:

- a. Transportasi: Pengembangan jalan, bandara, pelabuhan, serta jaringan transportasi umum yang terintegrasi ke destinasi wisata.
- b. Fasilitas umum: Ketersediaan hotel, *homestay*, restoran, dan pusat informasi bagi wisatawan.
- c. Teknologi digital: Penggunaan aplikasi *mobile*, situs web, serta platform digital untuk mempromosikan destinasi dan mempermudah wisatawan mendapatkan informasi, memesan tiket, atau berinteraksi dengan pemandu lokal.

5. Pentingnya Regulasi dan Standar Industri

Pemerintah biasanya menetapkan regulasi dan standar untuk memastikan pengelolaan pariwisata yang baik, yang meliputi:

- a. Perizinan usaha pariwisata bagi pengusaha lokal atau asing yang ingin terlibat dalam industri ini.
- b. Standar kualitas pelayanan yang diterapkan untuk akomodasi, pemandu wisata, transportasi, dan restoran.
- c. Pengawasan keamanan dan kenyamanan wisatawan, termasuk pengamanan dari kejahatan, bencana alam, serta standar kebersihan dan kesehatan yang diperketat selama pandemi.